Sinergitas Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam Upaya Mengurangi Stigma “Kampung Idiot” di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo

by Irvan N Ridho

Submission date: 18-Aug-2022 12:53PM (UTC+0700)
Submission ID: 1883837059
File name: 3._Sinergitas_Pemerintah_Desa_dengan_Masyarakat_dalam_Upaya.docx (71.14K)
Word count: 2497
Character count: 16834

Sinergitas Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam Upaya Mengurangi Stigma "*Kampung Idiot*" di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo

Abstrak

Stigma tentang kampung idiot merupakan masalah sosial yang perlu mendapat perhatian khusus. Perlu sinergitas dari pemerintah, baik ditingkat pusat, daerah dan desa serta masyarakat dalam menanggulangi permasalahan kampung idiot. Jika kampung idiot tidak segara ditangani maka akan berdampak terhadap sosial ekonomi dan budaya di wilayah tersebut. Oleh karena itu konstruksi sosial perlu dilakukan untuk mengubah stigma kampung idiot menjadi kampung yang maju. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian berada di desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo. Upaya yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat terbukti efektif,sehingga stigma kampung idiot yang melekat pada desa Karangpatihan sudah berkurang.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Sinergi, Stigma

Abstract

The stigma of an idiot village is a social problem that needs special attention. There needs to be synergy from the government, both at the central level, regional and village levels as well as the community in overcoming the problems of the idiot village. If the idiot village is not handled immediately, it will have an impact on the socio-economy and culture in the area. Therefore, social construction needs to be done to change the stigma of an idiot village into an advanced village. This study uses a qualitative method with a case study approach. The research location is in Karangpatihan village, Balong district, Ponorogo district. The efforts made by thevillage government and the community proved to be effective, so that the stigma of an idiot village attached to the Karangpatihan village had decreased.

Keywords*: Stigma, Synergy, Village Goverment*

Pendahuluan

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas

kehidupan, baik lahir maupun batin, jasmani dan rohani. Di samping itu karena sifatnya yang multidimensional dengan pembangunan juga akan diupayakan terjadi pemerataan di segala sektor, bidang maupun wilayah. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pembangunan bangsa Indonesia telah dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia terutama apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi, namun demikian dalam kenyataannya pembangunan yang telah dilaksanakan masih banyak ditemui kelemahan-kelemahan.

Tujuan pelaksanaan pembangunan adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu maka ukuran keberhasilan pembangunan dari suatu pemerintahan adalah mengurangi jumlah orang miskin. Hal ini disebabkan karena kemiskinan merupakan momok bagi Negara Dunia Ketiga, karena merupakan masalah sosial terbesar. Hampir di semua negara berkembang, 10 %, 20 %, atau paling banyak 30 % penduduk dapat menikmati hasil pembangunan, sisanya, mayoritas penduduk hidup melarat. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. (Poerwadarminta, 1976).

Salah satu upaya yang dalam mengurangi angka kemiskinan adalah pemberdayaan. Pemberdayaan adalah upaya perbaikan disegala aspek diantaranya sosial, budaya, politik, dan psikologi. Akan tetapi, pemberdayaan terlalu fokus dalam bidang ekonomi, padahal pemberdayaan merupakan bagian dari pemecahan masalah sosial. (O.S & A.M.W, 1996).

Masalah sosial yang dihadapi dalam pemberdayaan misalkan mengurangi stigma negatif. Stigma negatif melekat di desa yang warganya banyak mengalami keterbelakangan mental sehingga desa tersebut dilabeli dengan "kampung idiot". Salah satu desa di Kabupaten Ponorogo yang mendapat stigma kampung idiot adalah desa Karangpatihan yang berada di kecamatan Balong. Stigma kampung idiot memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo tahun 2017, jumlah penderita down syndrome di Desa Karangpatihan sebanyak 87 jiwa. Jumlah penderita tuna grahita sebanyak 48 kepala keluarga. Sepuluh orang di antaranya keterbelakangan yang fatal 10 orang, seperti lumpuh, bisu-tuli, sehingga tak bisa bekerja sama sekali. Sedangkan sisanya 77 orang mengalami keterbelakangan mental namun masih bisa bekerja.

Dari data di atas menunjukkan bahwa hanya sebagian dari warga yang tergolong difabel, namun karena hal tersebut desa Karangpatihan terlabeli atau terstigma dengan julukan kampung idiot. Untuk itu pengentasan desa Karangpatihan dari stigma kampung idiot perlu dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya pemerintah saja yang melakukan pengentasan ini namun masyarakat juga terlibat dalam upaya pengentasan desa dari stigma kampung idiot.

Upaya pengurangan stigma diperlukan agar desa Karangpatihan tidak terdiskriminasi akibat stigma kampung idiot. Sinergi perlu dilakukan agar program-program yang akan dilakukan bisa berjalan efektif. Sinergi didefinisikan sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan perusahaan atau pemerintahan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sesuai dengan yang ditulis oleh (Iversen, 1997), pedoman kesinergian antara lain:

a. Terpusat;
b. Terpadu;
c. Berkesinambungan;
d. Pendekatan multi instansional.

Sinergi yang baik memerlukan dua hal yaitu komunikasi dan koordinasi. Dimana komunikasi dibedakan menjadi dua bagian yaitu kegiatan menyampaikan gagasan dan kegiatan menanggapi gagasan (Sofyandi & Garniwa, 2007). Sedangkan, koordinasi merupakan integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. (Ulber, 2011).

Sinergi diartikan sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. (Afiyanti, Yati, Rachmawati, & Nur, 2014). Sedangkan menurut (Doctoroff, 1977), sinergi yang ideal adalah kepercayaan, komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, dan kreativitas. Menurut (Iversen, 1997), sinergi bisa terbangun jika ada koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sinergi didefinisikan sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan perusahaan atau pemerintahan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Sesuai dengan yang ditulis oleh (Iversen, 1997), pedoman kesinergian antara lain:

a. Terpusat;
b. Terpadu;
c. Berkesinambungan;
d. Pendekatan multi instansional.

Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi dapat dibedakan atas dua bagian yaitu komunikasi yang berorientasi pada sumber yang menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dengan mana seseorang secara sungguh-sungguh memindahkan stimulan guna mendapatkan tanggapan. Sedangkan komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan di mana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan. (Sofyandi & Garniwa, 2007)

b. Koordinasi

Di samping adanya komunikasi dalam menciptakan sinergitas juga memerlukan koordinasi. (Ulber, 2011) dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Manajemen menjelaskan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama

yaitu bekerja kearah tujuan bersama. Sedangkan (Afiyanti, Yati, Rachmawati, & Nur, 2014) menyebutkan ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu: 1) Hubungan langsung: Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung; 2) Kesempatan awal: Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan; 3) Kontinuitas Koordinasi: merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan; 4) Dinamisme: Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern; 5) Tujuan yang jelas: Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif; 6) Organisasi yang sederhana: Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif; 7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas: Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan; 8) Komunikasi yang efektif: Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik; dan 9) Kepemimpinan supervisi yang efektif: Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa sinergi adalah merupakan sebuah proses komunikasi, koordinasi, dan, berkelanjutan untuk mencapai tujuan. Dijelaskan bahwa tanpa ada unsur-unsur tersebut maka program-program yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan secara efektif. Maka sinergi merupakan kunci utama dalam mengimplementasikan progam supaya bisa berhasil.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi stigma negatif terhadap suatu wilayah, maka perlu sinergitas beberapa pihak agar program yang akan dilaksanakan bisa berjalan secara efektif.

Setiap Stigma (Goffman, 1963) tertarik pada jurang pemisah antara apa yang seharusnya dilakukan seseorang "identitas social virtual" dan apa yang sebenarnya dilakukan seseorang "identitas social actual". orang yang mempunyai jurang pemisah antara dua identitas ini distigmatisasikan. Buku tersebut memusatkan perhatian pada interaksi dramaturgis antara aktor yang terstigma dan yang normal.

Sifat interaksi itu tergantung pada stigma yang mana di antar dua jenis stigma yang terdapat pada diri seorang aktor. Dalam kasus stigma diskredit (discredit stigma), aktor menganggap perbedaan telah diketahui oleh anggota penonton atau jelas bagi mereka (contoh, orang yang tubuh bagian bawahnya lumpuh atau kehilangan anggota badan). Stigma diskreditabel (descriditable stigma) adalah stigma yang perbedaannya tak diketahui oleh anggota penonton atau tak dapat dirasakan oleh mereka (misalnya, seorang homoseksual). Masalah dramaturgis mendasar bagi seseorang yang mempunyai stigma terdiskreditkan adalah pengelolaan ketegangan yang dihasilkan oleh fakta bahwa orang mengetahui masalahnya. Masalah dramaturgis mendasar bagi seseorang yang mempunyai stigma diskreditabel adalah pengelolaan informasi sedemikian rupa sehingga masalahnya tetap tak diketahui oleh orang lain. (Ritzer & Goodman, 2004).

Ada tiga jenis stigma, yaitu stigma yang dibangun berdasarkan aspek fisik penderita (cacat), aspek karakter penderita (sifat yang dianggap negatif seperti orang yang bermotivasi lemah, bernafsu mendominasi orang secara berlebihan, berkeyakinan yang sangat fanatik, sangat tidak jujur), dan aspek tribal: suku-bangsa, ras, dan agama (faktor keturunan dan karena itu dapat "diwariskan" kepada seluruh anggota keluarga). (Oktavia, Widajanti, & Aruben, 2017)

Metode

Metode penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data secara *purposive sampling,* data yang sudah di kumpulkan kemudian di uji keabsahan melalui trianggulasi.

Hasil

Awal mula stigma kampung idiot, saat itu dua desa tersebut terserang hama tikus yang menyerang selama empat tahun yaitu dari tahun 1963-1967. Kondisi tersebut benar-benar membuat warga setempat benar-benar kesusahan mendapatkan makanan. Seluruh hasil bumi menjadi rusak dan warga gagal panen. Lokasi desa yang terpencil dan minimnya akses membuat warga tidak memiliki banyak pilihan makanan. Pada sisi yang lain, saat itu banyak ibu rumah tangga yang tengah mengandung anak. Kondisi inilah yang membuat ibu-ibu hamil kekurangan gizi. Akibatnya, bayi-bayi di desa Karangpatihan menjadi tumbuh tidak normal. Jumlah kelahiran bayi tidak normal pun semakin banyak karena hama tersebut menyerang selama empat tahun. Warga semakin menderita karena tanah di kawasan tersebut bersifat tadah hujan. Artinya hanya bisa ditanami sekali dalam setahun. Sebagaimana diketahui, Ponorogo memiliki sejumlah desa yang jumlah penduduk berkebutuhan khususnya mencapai ratusan jiwa. Gara-gara inilah, banyak orang menyebut daerah tersebut dengan sebutan kampung idiot. (Ramadhianto, 2013).

Sinergi didefinisikan sebagai proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan perusahaan atau pemerintahan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif (Iversen, 1997). Dalam hal ini sinergi dilakukan beberapa pihak yang berkaitan dalam hal memberdayakan masyarakat Desa Karangpatihan yang mendapat stigma negatif yaitu kampung idiot. Untuk mengurangi stigma negatif tersebut masyarakat perlu sinergi yang baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat.

Sedangkan sebutan Desa Karangpatihan sebagai "kampung idot" kurang tepat karena tidak semua orang yang mengalami keterbelakangan mental disebut idiot dan tidak semua yang cacat adalah keterbelakangan mental. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo tahun 2017, jumlah penderita keterbelakangan mental di Desa Karangpatihan hanya 0,015% dari seluruh jumlah penduduknya yang berjumlah 5.794 jiwa.

Maka dari itu untuk mengurangi stigma masyarakat tentang kampung idiot, perlu adanya upaya pemerintah dan masyarakat ini terbebas dari stigma negatif dari masyarakat dan media, salah satu tindakan warga yaitu membentuk kelembagaan sosial. Kelembagaan sosial tersebut berupa sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa Karangpatihan. Adapun proses sinergi tersebut sesuai pemaparan di atas:

a. Komunikasi antar lembaga

Komunikasi yang baik telah dibangun kepala desa Karangpatihan yaitu Eko Mulyadi dengan masyarakat setempat, terutama komunikasi dengan karang taruna di wilayahnya. Komunikasi dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal dibangun melalui forum-forum resmi antar lembaga desa seperti masyarakat, perangkat desa dan karang taruna, sedangkan secara informal dibangun melalui obrolan-obrolan di warung kopi bahkan juga dilakukan di pinggir jalan.

Gambar. 1 Kepala Desa berkomunikasi dengan masyarakat

Sejalan dengan yang di jelaskan oleh (Mulyana, 2001) bahwa komunikasi bersifat formal dan informal. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Komunikasi ini terjadi antara kepala desa, perangkat desa dan karang taruna sebagai institusi atau organisasi formal. Namun demikian komunikasi secara formal kurang efektif karena terlalu kaku dan pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan karena berbenturan dengan etika komunikasi.

Sedangkan komunikasi informal bisa berjalan dua arah, seperti komunikasi antar teman sejawat. Komunikasi informal terbentuk karena kesamaan persepsi antara masyarakat. Di dalam komunikasi informal terdapat jaringan komunikasi ini lebih dikenal dengan desas-desus (grapevine) atau selentingan (Muhammad, 1995). Selentingan merupakan saluran yang ampuh. Selentingan diperlukan para stakeholder dalam membuat perencanaan pemberdayaan dalam upaya pengentasan stigma negatif. Selentingan tersebut mungkin menyimpang, namun seringkali lebih diresponn dari pada pesan yang disampaikan melalui saluran formal. Selentingan –selentingan tersebut berisi laporan rahasia mengenai orang dan kejadian-kejadian yang tidak mengalir secara resmi. Informasi yang diperoleh dari selentingan adalah berkenaan dengan apa yang didengar atau apa yang dikatakan orang dan bukan apa yang di umumkan secara formal. Pesan ini mengalir tanpa memperhatikan hubungan struktural, dapat berubah-ubah dan tersembunyi. Komunikasi informal bisa dikatakan efektif karena memberikan informasi yang riil dan akurat. Bisa memberikan saluran yang tepat untuk mengatasi kemacetan disebabkan saluran formal. Ibaratnya komunikasi informal seperti jalan tol untuk mencapai tujuan.

b. Koordinasi

Dalam buku yang berjudul Asas-asas Manajemen menjelaskan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.

Koordinasi antara suatu organisasi atau kelompok dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu dapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama. (Ulber, 2011) Dalam Koordinasi Pemerintah Desa dan masyarakat dilakukan dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa yaitu tentang pemberdayaan masyarakat tunagrahita untuk mengatasi stigma kampung idiot.

Pemerintah desa dan masyarakat dalam merencanakan program-program selalu berkoordinasi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Sehingga setiap program- program disampaikan dalam suatu musyawarah Desa. Musyawarah desa merupakan representasi dari koordinasi, dimana di dalamnya terdapat penyampaian rencana tujuan, pembagian tugas dan evaluasi. Dalam penyelenggaraannya, kepala desa dan masyarakat mempunyai tugas yaitu mengidentifikasi dan menyampaikan kebutuhan masyarakat.

Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan adalah merencanakan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pemberdayaan dilakukan secara partisipasif dengan melibatkan masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal pemberdayaan warga tunagrahita nantinya mampu menciptakan keterbukaan, kerja sama yang kua dan accountable.

Terbukti upaya pemberdayaan warga tunagrahita di Desa Karangpatihan sudah baik dimana Pemerintah Desa dan Masyarakat selalu berkordinasi atau bekerja sama untuk melaksanakan program-program yang menyangkut kepentingan baik itu pemberdayaan ekonomi maupun masalah pengurangan stigma kampung idiot di Desa Karangpatihan.

Gambar.2 Pelatihan pembuatan keset di rumah harapan

Meskipun terdapat beda pendapat namun bisa di selesaikan secara musyawarah. Program-program yang sudah berjalan yaitu Kepala Desa mendampingi warga tunagrahita untuk di berikan bantuan berupa kolam lele dan membuat kerajinan seperti keset.

Program ini berjalan karena sinergitas komponen masyarakat bukan hanya Pemerintrah Desa namun Masyarakat yang ada di Desa Karangpatihan. Masyarakat Desa Karangpatihan menginginkan agar seluruh masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak meskipun mereka mengalami disabilitas. Pemerintah desa dan Masyarakat berfungsi sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam membangun desa terutama pembangunan desa di pemberdayaan masyarakat tunagrahita. Dengan demikian keberhasilan pengentasan warga difabel tergantung dari baik tidaknya sinergitas antara masyarakat dan para pelayan publik yang berkewajiban melayani kepentingan masyarakat.

Kesimpulan

Kampung idiot bukanlah kampung yang isinya orang idiot. Akibat stigma dari masyarakat inilah yang menyebabkan kampung idiot menjadi terkucilkan dan semakin terpuruk. Karena itulah sinergitas dalam pemberdayaan di perlukan untuk mengubah stigma-stigma tentang kampung idiot. Sinergitas kampung sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan adanya peningkatan ekonomi dan berubahnya stigma sosial terhadap warga

desa Karangpatihan. Perlunya mengembangkan model komunikasi yang intens agar pemberdayaan warga kampung idiot sesuai dengan kebutuhan mereka. Perlu dibudayakan diantara warga masyarakat dan pemerintahan desa untuk menjaga interaksi sosial yang aktif.

Sinergitas Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam Upaya Mengurangi Stigma “Kampung Idiot” di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo

ORIGINALITY REPORT

16%	0%	16%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%

★ Fitri Ambarwati, Ismail Ismail. "Kajian Administrasi Perencanaan Transportasi Perkotaan Berbasis Sinergi Pemerintah Kota, Bhabinkamtibnas, dan Perguruan Tinggi (Studi Kasus Kota Surabaya)", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2020

Publication

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		